

**RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM
2022**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2021**

**RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM
2022**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 3 Agustus 2021

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam**



SALIM, S.Sos, M.Si

NIP. 19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ...	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	18
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	18
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	19
2.3.3 Peluang dan Tantangan	25
2.3.4 Isu-isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3	Program dan Kegiatan	37
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V	PENUTUP	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3
Gambar 2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021	10
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
Tabel 3	Capaian Kinerja Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda Tahun 2020	18
Tabel 4	Pemetaan Permasalahan Umum Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	20
Tabel 5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	25
Tabel 6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	33
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	37
Tabel 8	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	40
Tabel 9	Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan

Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir Renja, dan penetapan Renja. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



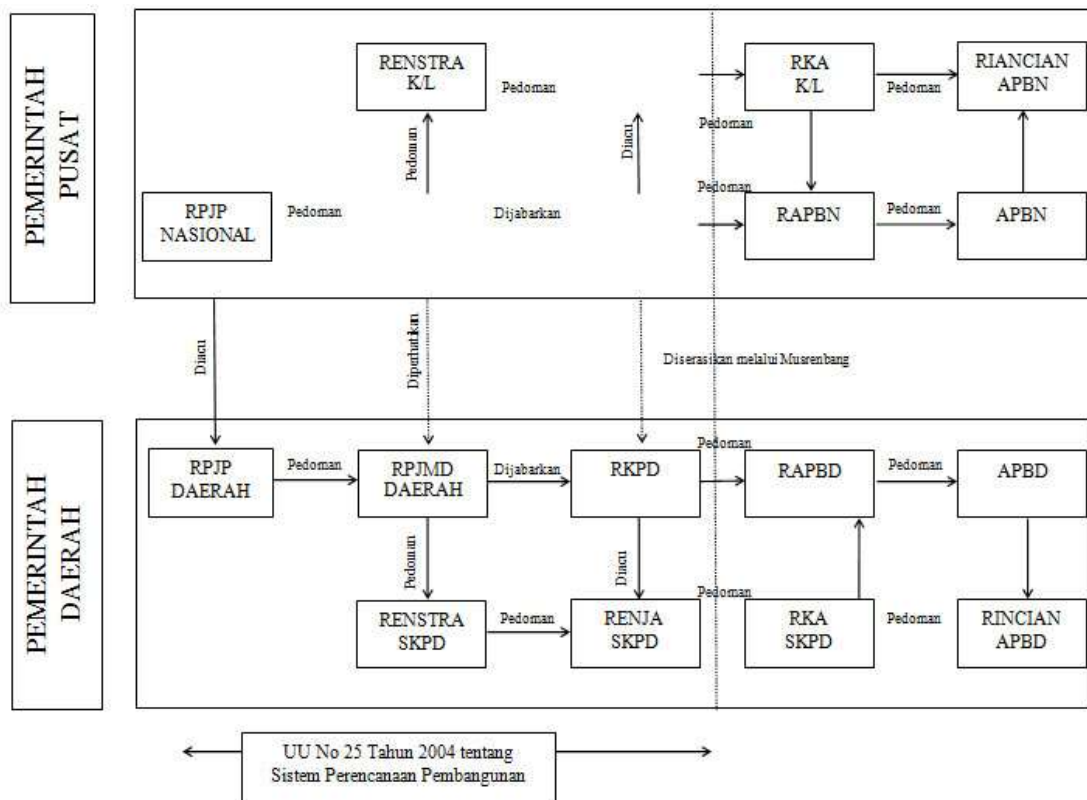
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
- r. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batan Nomor 108);

- t. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 488);
- u. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, yaitu pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya; landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Renja tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merencanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
 - 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat:
 - 1) Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah;
 - 2) Pengamanan Obyek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam;
 - 3) Peningkatan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Walikota.

Program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan program dan kegiatan yang sama sebagaimana tertuang dalam Renja dan tambahan 1 kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD Kota Batam yaitu Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam.

Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan pencapaian Renstra:

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
01	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pamong Praja Kota Batam								
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100%	100
	01	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	02	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
1.01.05	Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	50 kali	25 kali	15 kali	20 kali	133.33%	15 kali	15 Kali	100
	01	Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan	12 kali	12 kali	1 kali	1 kali	100	8 kali	8 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Milik Pemerintah	liar/bangunan bermasalah di lahan milik Pemerintah								
02	Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Terlaksananya operasi yustisi terhadap pelanggaran perda	12 kali	12 kali	-	3 kali	100	8 kali	8 kali	100
03	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Terlaksananya pengamanan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis	50 kali	25 kali	15 kali	20 kali	133,33	15 kali	15 kali	100
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	344 orang	60 orang	-	-	-	100 orang	-	-
01	Peningkatan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Walikota	Jumlah TPS yang diamankan	2100 TPS	-	2923 TPS	2177 TPS	74,48	-	-	-

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2020, ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2020 dan Renstra dengan rincian sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Renja Tahun 2020:

1) Peningkatan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Walikota, dengan realisasi capaian sebesar 74,48 %. Dari target 2923 TPS, realisasi jumlah TPS selama Pilkada 2020 sebanyak 2177 TPS. Capaian yang tidak sesuai target ini terjadi karena jumlah TPS ditetapkan setelah APBD Perubahan disahkan, sementara penetapan target masih menggunakan data TPS Pemilu 2019.

b. Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja Renja Tahun 2020:

1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;

c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja Renja Tahun 2020:

1) Akibat pandemi Covid-19, Kegiatan Operasi Yustisi terhadap Peraturan Daerah Kota Batam pada Perubahan Renja Tahun 2020 tidak dianggarkan, akan tetapi karena adanya permintaan masyarakat maka kegiatan tersebut diusulkan Kembali pada saat pembahasan di Komisi I DPRD Kota Batam sebanyak 3 kali. Dengan demikian Kegiatan tersebut telah melebihi target Renja Tahun 2020;

2) Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam, dengan realisasi pelaksanaan sebanyak 20 kali dari yang direncanakan sebanyak 15 kali, sehingga tingkat capaian realisasinya sebesar 133,33%

Meskipun tingkat capaian realisasi sebesar 133,33% dari Renja Tahun 2020, namun capaian kinerja realisasi Tahun 2020 masih belum memenuhi capaian target kinerja Renstra, yaitu 50 kali. Capaian kinerja tahun 2020 baru memenuhi 40% dari target

Renstra.

Hal ini terjadi karena sepanjang tahun 2020 tidak banyak aksi-aksi demonstrasi yang diizinkan oleh Pihak Keamanan karena sepanjang tahun 2020, Kota Batam dan seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan massa dilarang.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 telah memenuhi target kinerja Renja 2020 dan Renstra, meskipun ada kegiatan yang tidak dilaksanakan akibat rasionalisasi dan *refocussing* anggaran guna penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu ke depan diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Batam melalui TAPD dalam memberikan pagu anggaran yang cukup kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memenuhi target kinerja Renja maupun Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 3 (tiga program) yaitu Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2020:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2020)	Tahun n-1 (2021)	Tahun n (2022)	Tahun n+1 (2023)	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %	
2	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2020)	Tahun n-1 (2021)	Tahun n (2022)	Tahun n+1 (2023)	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
3	Jumlah aksi demo yang diamankan			50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	20 kali	6 kali	25 kali	25 kali	Realisasi capaian 40% menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 tidak banyak aksi-aksi demonstrasi yang diizinkan oleh Pihak Keamanan karena sepanjang Tahun 2020, Kota Batam dan seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan massa dilarang.
4	Jumlah Linmas yang diberdayakan			344 orang	344 orang	344 orang	344 orang	0 orang	0 orang	100 orang	100 orang	Target capaian disesuaikan dengan kemampuan anggaran

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang ada, realisasi capaian kinerja pada 2 (dua) indikator telah tercapai, yaitu Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tingkat capaian 100%.

Namun ada 2 indikator kinerja yang realisasi capaiannya tidak memenuhi target Renstra yaitu indikator kinerja jumlah aksi demo yang diamankan dengan realisasi capaian hanya 40%, di mana dari target 50 aksi demo yang diamankan ternyata hanya ada 20 aksi demo yang terjadi sepanjang tahun 2020. sepanjang tahun 2020 tidak banyak aksi-aksi demonstrasi yang yang diizinkan oleh Pihak Keamanan karena sepanjang tahun 2020, Kota Batam dan seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan massa dilarang. Sedangkan untuk indikator kinerja jumlah Linmas yang diberdayakan, dari target 344 orang tidak terealisasi sehingga tingkat realisasi capaian 0%. Hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi dan *refocussing* anggaran guna penanganan pandemi Covid-19, sehingga realisasi pemberdayaan Linmas tidak dilaksanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), dalam aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat *outcome* Pemerintah Daerah, indikator kinerja bidang/urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah:

- a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

- b. Persentase Penegakan Perda, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Pelanggaran penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

Capaian kinerja penyelesaian pelanggaran K3 dan pelanggaran Perda tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Capaian Kinerja Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang Selesai	Realisasi
1	2	3	4	5	17
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	777	713	91.76%
2	Persentase Penegakan PERDA	100%	257	249	96.89%

Selain indikator kinerja *outcome* sebagaimana tertuang dalam Tata Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288), indikator kinerja kunci (IKK) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**, dengan rumus perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$$

Sepanjang tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menerima 93 (sembilan puluh tiga) pengaduan dari masyarakat maupun instansi terkait, dan dari 93 (Sembilan puluh tiga) pengaduan tersebut, sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) berhasil diselesaikan, dengan tingkat capaian kinerja 97.85 %.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja ditemukan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan umum yang dapat diidentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4

**Pemetaan Permasalahan Umum Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19 2. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19 2. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kualitas SDM aparatur masih kurang 2. Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran masih kurang

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota Batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota

Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, pandemi Covid-19 yang menyerang dunia tak terkecuali Indonesia dan Kota Batam sejak tahun awal tahun 2020 telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi berbagai sektor terutama ekonomi dan kesehatan. Salah satu upaya pencegahan pandemi tersebut adalah dengan menerapkan cara hidup baru yang biasa disebut *New Normal* dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Penerapan protokol kesehatan di Kota Batam diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Batam. Dan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk menegakkan Perda/Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja berada di garis terdepan dalam penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di atas.

Pengawasan atas kepatuhan masyarakat dan penegakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19 harus terus dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Batam.

2.3.4 Isu-Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan

menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
- e. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- f. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- g. Mengembangkan wilayah (Kecamatan) untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- h. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD;
- i. Pembangunan berbasis gender (perempuan, anak, disabilitas, dan lansia);
- j. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya

cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.

Dalam rangka pencegahan Covid-19 dan adaptasi terhadap kehidupan normal baru, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Walikota Batam (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah Kota Batam yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dan menjadi garda terdepan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perwako tersebut.

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.

c. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan

rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota Batam.

Oleh karena itu penataan bahu jalan guna mendukung peningkatan infrastruktur pada jalan-jalan utama dan penertiban Kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan terus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama tim terpadu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Ranwal RKPD, salah satu prioritas pembangunan tahun 2022 adalah Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah, dengan fokus menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi melalui fasilitasi sarana pendukung investasi di bidang lahan, infrastruktur dasar dan utilitas serta dukungan aspek legal. Salah satu program untuk mewujudkan prioritas dan fokus pembangunan tersebut adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang merupakan urusan yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Batam**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam		100%	57,592,020,593	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	100%	56,280,454,992	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	30,998,416,927	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	31,132,070,897	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam		1 Tahun	30,932,256,927	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	212 Orang	31,063,318,897	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam		1 Tahun	66,160,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	27 Kegiatan	68,752,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1,781,400,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	906,975,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam		1 Tahun	1,781,400,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	653 Stel	906,975,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	1,279,368,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	1,375,212,335	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam		1 Tahun	8,081,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis	8,077,850	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam		1 Tahun	133,244,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	285,263,605	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam		1 Tahun	817,827,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	801,267,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam		1 Tahun	61,222,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	61,174,880	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam		1 Tahun	7,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Jenis	7,200,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam		1 Tahun	251,794,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	25 Kali	212,229,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3,120,451,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	2,667,853,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam		6 Unit	2,563,136,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Jenis	2,034,036,000	
Pengadaan Mebel	Kota Batam		1 Tahun	264,500,000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah jenis mebel yang diadakan	5 Jenis	178,005,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam		1 Tahun	292,815,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	6 Jenis	455,812,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	18,509,507,760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	18,523,007,760	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam		1 Tahun	223,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Jenis	236,700,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam		1 Tahun	18,286,307,760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi	448 Orang	18,286,307,760	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,902,876,406	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	1,675,336,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam		1 Tahun	56,693,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	9 Unit	71,740,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam		1 Tahun	292,357,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	17 Unit	488,950,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam		1 Tahun	27,715,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 Unit	25,770,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam		1 Tahun	1,526,110,606	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	1,088,876,000	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam		100%	4,227,018,000	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	1. Tingkat penyelesaian pelanggarn K3	100%	2,692,376,375	
							2. Persentase penegakan Perda	100%		
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Tingkat Penyelesaian Pelanggarn K3	100%	3,651,037,000	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani	100%	1,906,906,125	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan	Kota Batam		12 Kali	96,480,000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan	Kota Batam	Persentase potensi gangguan trantibum	100%	101,880,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		yang dapat dicegah			
Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Batam		37 Kali	762,450,000	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Batam	1. Jumlah lokasi yang ditertibkan 2. Persentase unjuk rasa yang ditangani	12 Lokasi 100%	900,500,000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kota Batam		320 Orang	2,213,667,500	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kota Batam	Jumlah petugas Linmas yang diberdayakan	100 Orang	186,734,500	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Kota Batam		59 Orang	310,704,500	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia	Kota Batam	1. Jumlah pejabat fungsional yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya 2. Jumlah Polisi Pamongpraja yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya	84 Orang 25 Orang	467,791,625	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kota Batam		100%	267,735,000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kota Batam	Persentase warga terdampak yang mendapatkan ganti rugi penegakan Perda/Perkada yang diberikan	100%	250,000,000	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Persentase Penegakan Perda	100%	477,930,000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100%	582,780,000	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam		12 Kali	111,480,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Jumlah kelompok sasaran peserta sosialisasi Perda/Perkada	12 sasaran	111,480,000	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam		30 Kali	189,000,000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Jumlah sasaran pelaksana Perda/Perkada yang diawasi atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100 sasaran	241,500,000	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam		12 Kali	177,450,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Batam	Persentase aduan/temuan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani	100%	229,800,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kota Batam	Persentase PPNS Kota Batam yang terlatih		98,051,000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kota Batam	Persentase PPNS yang telah memiliki sertifikat pemantapan keahlian	100%	202,690,250	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Batam		54 Orang	98,051,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Batam	Jumlah Polisi Pamongpraja/PPNS yang difasilitasi pengembangan kapasitasnya	54 Orang	202,690,250	
Total				61,819,038,593	Total				58,972,831,367	

2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepada pemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui Musrenbang maupun yang disampaikan langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Menurut pengamatan kami, selama pelaksanaan Musrenbang tahun 2021 mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota, tidak ada usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga penelaahaan usulan program dan kegiatan masyarakat tidak disajikan dan dibahas pada sub bab ini.

Tabel 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2022
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur**". Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk

menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini kita telah memasuki RPJMN ke-4 (2020-2024) yang merupakan periode ke-2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kini berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin setelah kembali terpilih pada Pemilu tanggal 17 April 2019 dan telah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

7 (tujuh) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 di atas tetap dipertahankan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

3.2. Tujuan, dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah **“Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

- a. Menurunnya pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan);
- b. Menurunnya pelanggaran Perda.

Rincian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran terhadap K3 dan Perda	5%	10%	15%	20%	25%	30%
		1. Menurunnya pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	1. Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketentraman, kenyamanan, keindahan)	5%	10%	15%	20%	25%	30%
		2. Menurunnya pelanggaran Perda	2. Persentase penurunan pelanggaran Perda	5%	10%	15%	20%	25%	30%

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;

2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota:

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;

3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022 adalah berikut:

Tabel 8

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								64,870,114,504
1	05	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Kota Batam	100%	56,280,454,992	APBD		100%	61,908,500,491
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	31,132,070,897	APBD		100%	34,245,277,987

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	Kota Batam	212 Orang	31,063,318,897	APBD		212 Orang	34,169,650,786.70
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	Kota Batam	27 kegiatan	68,752,000	APBD		27 kegiatan	75,627,200.00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	906,975,000	APBD		100%	997,672,500
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Kota Batam	653 Stel	906,975,000	APBD		655 Stel	997,672,500.00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam	100%	1,375,212,335	APBD		100%	1,512,733,569
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Batam	7 Jenis	8,077,850	APBD		7 Jenis	8,885,635.00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Batam	9 Jenis	285,263,605	APBD		9 Jenis	313,789,965.50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Batam	4 Jenis	801,267,000	APBD		4 Jenis	881,393,700.00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Batam	9 Jenis	61,174,880	APBD		9 Jenis	67,292,368.00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Batam	2 Jenis	7,200,000	APBD		2 Jenis	7,920,000.00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Kota Batam	12 Kali	212,229,000	APBD		12 Kali	233,451,900.00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	2,667,853,000	APBD		100%	2,934,638,300
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Batam	2 Jenis	2,034,036,000	APBD		2 Jenis	2,237,439,600.00
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	Kota Batam	5 Jenis	178,005,000	APBD		4 Jenis	195,805,500.00
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kota Batam	12 Jenis	455,812,000	APBD		12 Jenis	501,393,200.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	18,523,007,760	APBD		100%	20,375,308,536
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Batam	4 Jenis	236,700,000	APBD		4 Jenis	260,370,000.00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi	Kota Batam	448 Orang	18,286,307,760	APBD		448 Orang	20,114,938,536.00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	1,675,336,000	APBD		100%	1,842,869,600
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan kendaraan	Kota Batam	9 Unit	71,740,000	APBD		9 Unit	78,914,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	Kota Batam	13 Unit	488,950,000	APBD		18 Unit	537,845,000.00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Batam	45 Unit	25,770,000	APBD		60 Unit	28,347,000.00
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Batam	4 Unit	1,088,876,000	APBD		4 Unit	1,197,763,600.00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Kota Batam	100%	2,692,376,375	APBD		100%	2,961,614,013
					2. Persentase Penegakan Perda		100%				100%		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Kota Batam	100%	1,906,906,125	APBD		100%	2,097,596,738

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase potensi gangguan trantibum yang dapat dicegah	Kota Batam	100%	101,880,000	APBD		100%	112,068,000.00
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.Jumlah lokasi yang ditertibkan 2.Persentase unjuk rasa yang ditangani	Kota Batam	12 Lokasi	900,500,000	APBD		12 Lokasi	990,550,000.00
	05	02	2.01				Kota Batam	100%				100%	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Petugas Linmas yang diberdayakan	Kota Batam	100 Orang	186,734,500	APBD		100 Orang	205,407,950.00
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.Jumlah Polisi Pamongpraja yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya 2.Jumlah pejabat fungsional yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	Kota Batam	25 Orang	467,791,625	APBD		25 Orang	514,570,787.50
	05	02	2.01				Kota Batam	59 Orang				84 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Persentase warga terdampak yang mendapatkan ganti rugi penegakan Perda/Perkada yang diberikan	Kota Batam	100%	250,000,000	APBD		100%	275,000,000.00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kota Batam	100%	582,780,000	APBD		100%	641,058,000
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kelompok sasaran peserta sosialisasi Perda/Perkada	Kota Batam	12 sasaran	111,480,000	APBD		12 sasaran	122,628,000.00
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sasaran pelaksana Perda/Perkada yang diawasi atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda/perkada	Kota Batam	100 sasaran	241,500,000	APBD		100 sasaran	265,650,000.00
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase aduan/temuan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani	Kota Batam	100%	229,800,000	APBD		100%	252,780,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang telah memiliki sertifikat pematapan keahlian	Kota Batam	100%	202,690,250	APBD		100%	222,959,275
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Polisi Pamongpraja/PPNS yang difasilitasi pengembangan kapasitasnya	Kota Batam	54 Orang	202,690,250	APBD		54 Orang	222,959,275.00
Total									58,972,831,367				64,870,114,504

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						58.972.831.367			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						56.280.454.992			
1	5	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						31.132.070.897			
1	5	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	212 Orang	100 Persen	31.063.318.897	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	5	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100 Persen	27 Kegiatan	100 Persen	68.752.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								906.975.000		
1	5	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	653 Stell	100 Persen	906.975.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.375.212.335		
1	5	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	5 Jenis	100 Persen	8.077.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	6 Jenis	100 Persen	285.263.605	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	4 Jenis	100 Persen	801.267.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	2 Jenis	100 Persen	61.174.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	5	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	4 Jenis	100 Persen	7.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	25 Kali	100 Persen	212.229.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.667.853.000			
1	5	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	2 Jenis	100 Persen	2.034.036.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah jenis mebel yang diadakan	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	5 Jenis	100 Persen	178.005.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	6 Jenis	100 Persen	455.812.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							18.523.007.760			
1	5	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	4 Jenis	100 Persen	236.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	5	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	448 Orang	100 Persen	18.286.307.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.675.336.000			
1	5	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	9 Unit	100 Persen	71.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	17 Unit	100 Persen	488.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	5	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	60 Unit	100 Persen	25.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 Persen	4 Unit	100 Persen	1.088.876.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2.692.376.375			
1	5	2	2		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							1.906.906.125			
1	5	2	2	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Penegakan Perda	Persentase potensi gangguan trantibum yang dapat dicegah	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 Persen	101.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3				100 %					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	5	2	2	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penegakan Perda	Jumlah lokasi yang ditertibkan	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Lokasi	100 Persen	900.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase unjuk rasa yang ditangani			100 %	100 Persen				
1	5	2	2	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	Jumlah petugas Linmas yang diberdayakan	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 Persen	186.734.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3				100 %					
1	5	2	2	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penegakan Perda	Jumlah pejabat fungsional yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 %	84 Orang	100 Persen	467.791.625	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Jumlah Polisi Pamongpraja yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya			100 %	25 Orang				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	5	2	2	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Penegakan Perda	Persentase warga terdampak yang mendapatkan ganti rugi penegakan Perda/Perkada yang diberikan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 Persen	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3				100 %					
1	5	2	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								582.780.000		
1	5	2	2	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Jumlah kelompok sasaran peserta sosialisasi Perda/Perkada	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Sasaran	100 Persen	111.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3				100 %					
1	5	2	2	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Jumlah sasaran pelaksana Perda/Perkada yang diawasi atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Sasaran	100 Persen	241.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3				100 %									
1	5	2	2	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Persentase aduan/temuan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Persen	100 Persen	229.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3				100 %									
1	5	2	2		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					202.690.250					
1	5	2	2	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Polisi Pamongpraja/PPN S yang difasilitasi pengembangan kapasitasnya	Persentase PPNS yang memiliki sertifikat pemantapan keahlian penyidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	54 Orang	54 Orang	202.690.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3				100 %									
									TOTAL	58.972.831.367					

BAB V

PENUTUP

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2022 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan Rancangan RKPD Tahun 2022 yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2022 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Renja Tahun 2022 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Renja Tahun 2022 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.